

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**2024**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, 28 Februari 2025  
Inspektur Kota Tebing Tinggi



H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE  
NIP. 19650603 198602 1 004

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.

Laporan tahunan tentang realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi ini disusun berdasarkan realisasi program kerja yang dimulai awal tahun 2023 untuk menyajikan informasi yang objektif dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 21 dan 22 disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disampaikan oleh Kepala OPD kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, kami terbuka atas kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi ini berguna sebagai salah satu bahan penelitian atas realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bahan penyusunan LKjIP Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

Tebing Tinggi, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi



**Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, M.M., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19760731 200801 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

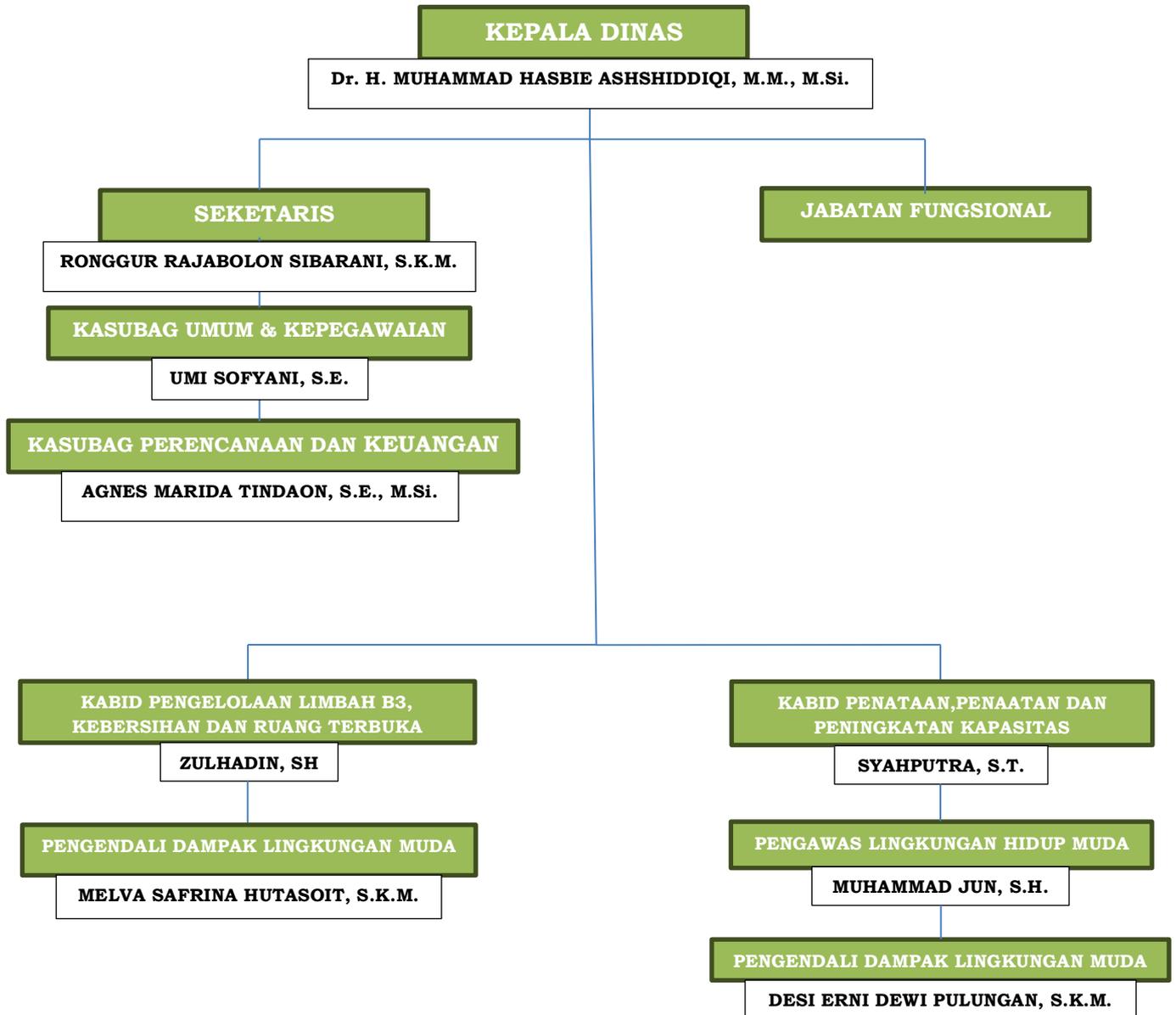
Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup, kehutanan, dan kebersihan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup,kehutanan dan kebersihan,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan,
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup, adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi dan Tata Kerja



## Keadaan Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan dukungan sumber daya organisasi. Daftar pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikannya per tanggal 11 Januari 2024 dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup**

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	<b>Dr. H. MUHAMMAD HASBIE ASHSHIDDIQI, M.M., M.Si.</b>	<b>197607312008011001</b>	<b>IV/b</b>	<b>Kepala Dinas</b>
2	<b>RONGGUR RAJABOLON SIBARANI, S.K.M.</b>	<b>197502022000031003</b>	<b>IV/b</b>	<b>Sekretaris</b>
3	<b>UMI SOFYANI, S.E.</b>	<b>198303032008012004</b>	<b>III/c</b>	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>
4	NAZAR ASMAWI LUBIS, S.Kom	199110082019031006	III/b	Analisis Sistem Informasi
5	<b>AGNES MARIDA TINDAON, S.E., M.Si.</b>	<b>198611122010012031</b>	<b>III/d</b>	<b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan</b>
6	MEIFIANSYAH, A.Md.	197905102011011006	III/b	Bendahara
7	SASTI LESTARI, S.Kom.	199511212019032014	III/b	Analisis Sistem Informasi
<b>BIDANG PENATAAN, PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS</b>				
8	<b>SYAHPUTRA, S.T.</b>	<b>198209152005021002</b>	<b>III/d</b>	<b>Kabid Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas</b>
9	<b>MUHAMMAD JUN, S.H.</b>	<b>197506082003121004</b>	<b>III/d</b>	<b>Pengawas Lingkungan Hidup Muda</b>
10	<b>DESI ERNI DEWI PULUNGAN, S.K.M.</b>	<b>197912182003122003</b>	<b>III/d</b>	<b>Pengendali Dampak Lingkungan Muda</b>
11	HERLINA YANTI PANJAITAN, S.T.	197802022010012013	III/d	Penyuluh Lingkungan Hidup
12	EGIA PUTRI K SEMBIRING, S.T.	199503162019032011	III/b	Penelaah Dampak Lingkungan
13	IMELDA SAURTUA JULIARTA SIJABAT, S.T.	199307312019032008	III/b	Penelaah Dampak Lingkungan
<b>BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3, KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU</b>				
14	<b>ZULHADIN, SH</b>	<b>198110032006041008</b>	<b>III/d</b>	<b>Kabid Pengelolaan Limbah B3, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau</b>
15	<b>MELVA SAFRINA HUTASOIT, S.K.M.</b>	<b>197605112008042001</b>	<b>III/c</b>	<b>Pengendali Dampak Lingkungan Muda</b>
16	DIAN ABADI SIREGAR, S.STP., M.Si.	198301142001121002	III/d	Plt. Pengawas Lingkungan Hidup Muda
17	NURMAIDA SARI, S.T.	198801272010012005	III/d	Analisis Lingkungan Hidup

18	ALI MUKMIN RITONGA, S.Si.	198412282019031001	III/b	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
19	MARSINI NATALIA BR SEMBIRING, S.Si.	198511122019032008	III/b	Analisis Lingkungan Hidup
20	IMELDA SIAHAAN, S.Si	198601112010012024	III/b	Analisis Lingkungan Hidup
21	MUHAMMAD EMIR AULIA, S.Si.	198904172019031005	III/b	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
22	RIBKA TIWA NAIBAHO, S.Si.	199010102019032015	III/b	Analisis Lingkungan Hidup
23	ANGGI OTARI SIHITE, S.T.	199410152019031007	III/b	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
24	MORITZ THOMSEN MARBUN, S.T.	198802212020121005	III/a	Analisis Pembangunan
25	ANGELIKA RORIA SIHOMBING, S.T.	199605172020122012	III/a	Analisis Pembangunan
26	SUCI HANDAYANI, S.T.	198904202022032001	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
27	JULKARNAEN	196909012007011013	II/d	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
28	RAJAB	197209042008011003	II/d	Juru Pungut Retribusi
29	AGUS HARYADI SYAHPUTRA	198008192009011001	II/d	Pengadministrasian TPA
30	SUHERIONO	198311072009011003	II/d	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
31	IRMAWATI NASUTION	196809022012122001	II/c	Pranata Taman
32	HARYONO	197005122012121002	II/c	Juru Pungut Retribusi
33	SUDIR	197709122007011005	II/c	Teknisi Mesin
34	YOPI BURNAMA CHAIRUL	198107112012121004	II/c	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
35	SELAMAT PUTRA	198112022008011001	II/c	Juru Pungut Retribusi
36	PONIRAN	197107032007011004	II/b	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
37	SULASTRI	197209092008012001	II/b	Juru Pungut Retribusi
38	SUPRIATI	197306162008012003	II/b	Pranata Taman
39	DEDI MAHYUDI	197602102007011008	II/b	Pengadministrasian TPA
40	LILIK SURIANTO	198506052012121002	II/b	Teknisi Mesin
41	MHD RIDUAN	198201032012121003	II/a	Juru Pungut Retribusi
42	JUMIATI	197707202009012002	I/d	Juru Pungut Retribusi
43	YUDI SYAHPUTRA	197905202009011002	I/d	Pramu Kebersihan
44	AGUS RAMLAN NASUTION	196608082012121002	I/c	Pramu Kebersihan
45	IIS MISDIANTO	198105012012121002	I/c	Pramu Kebersihan

**Tabel 2 Distribusi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan/ Pangkat**

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV/b	2
2	IV/a	0
3	III/d	8
4	III/c	2
5	III/b	11
6	III/a	3
7	II/d	4
8	II/c	5
9	II/b	5
10	II/a	1
11	I/b	0
12	I/d	2
13	I/c	2
<b>J u m l a h</b>		<b>45</b>

### Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu unit kerja/lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam bidang lingkungan hidup di pemerintahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi , Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024**

Nama Barang	Jumlah
TANAH	3
ALAT BESAR	3
KOMPUTER	46
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0
ALAT KESELAMATAN KERJA	0
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2
ALAT ANGKUTAN	17
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29
ALAT PERTANIAN	12
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	624
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8
ALAT LABORATORIUM	122
ALAT PERSENJATAAN	23
BANGUNAN GEDUNG	6
MONUMEN	0
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0
JALAN DAN JEMBATAN	1
BANGUNAN AIR	14
INSTALASI	11
JARINGAN	4
BAHAN PERPUSTAKAAN	20
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1

### 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup adalah bertanggung jawab pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan, pengelolaan,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi. Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium belum terakreditasinya lingkungan hidup;
2. Kurangnya pelatihan khusus peningkatan kompetensi di bidang lingkungan hidup;
3. Lalainya masyarakat memahami kebutuhannya sendiri terhadap lingkungan yang sehat sekarang dan masa yang akan datang;
4. Pelaku dunia usaha dan kegiatan yang air limbah dan emisi buangnya tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
5. Pelaku dunia usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaporkan pengelolaan lingkungan industrinya secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi;
6. Usaha dan/ atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.

#### 1.4 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Asas Pengelolaan Keuangan Negara adalah Akuntabilitas Berorientasi Hasil, Penerapan Anggaran Berbasis Prestasi Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil;

6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP.

#### 1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Isu-isu Strategis, Keadaan Pegawai, Sarana dan Prasarana, Keuangan serta Sistematika Laporan LKjIP.

##### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, visi misi kepala daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan strategi, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, rencana anggaran, target belanja OPD, serta alokasi anggaran per sasaran strategis. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka

mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi sistem (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Tebing Tinggi melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dan sistem kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing sistem sasaran tersebut dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pencapaiannya pada analisis dan evaluasi, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik disamping untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, dalam rangka untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi dari Walikota Tebing Tinggi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

### Tujuan:

1. Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan.

### Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Tebing Tinggi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mengikuti kebijakan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama, dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggambarkan kualitas lingkungan hidup Kota Tebing Tinggi yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan.

**Tabel 4. Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,13	57,49	57,60	58

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang harus dicapai, dimana Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Rencana Kinerja mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026.

Merujuk pada Tabel diatas, dapat dijabarkan Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,49

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan /	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,49

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sesuai Kepmendagri Nomor: 050/3708/2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Bulan	12	5.018.585.020
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Dokumen	10	91.817.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	80.299.800
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Dokumen	5	11.517.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi keuangan	Dokumen	30	4.235.128.800
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	Orang	60	4.166.629.000
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	Dokumen	24	13.298.000

<b>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan An/Semesteran Skpd</b>	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	<b>Dokumen</b>	<b>4</b>	<b>55.201.800</b>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Laporan pelaksanaan barang milik daerah	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>27.467.200</b>
<b>Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd</b>	Jumlah premi asuransi gedung kantor dan kendaraan dinas	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>24.972.200,</b>
<b>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan bmd pada SKPD	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>2.495.000</b>
<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Pengadaan Pakaian Batik	<b>Set</b>	<b>62</b>	<b>15.500.000</b>
<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	Laporan pelaksanaan administrasi umum	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>266.605.000</b>
<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>19.993.600</b>
<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>29.998.900</b>
<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>15.000.500</b>
<b>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd</b>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>201.612.000</b>
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah</b>	Jumlah bmd yang diadakan	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>25.512.300</b>

<b>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</b>	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>20.209.900</b>
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana	<b>Buah</b>	<b>2</b>	<b>5.302.400</b>
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>243.904.320</b>
<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	Tersedianya jasa surat menyurat	<b>Unit</b>	<b>12</b>	<b>3.003.000</b>
<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>112.664.000</b>
<b>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>128.237.320</b>
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik DaerahJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>112.650.000</b>
<b>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</b>	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>53.200.000</b>
<b>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</b>	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>59.450.000</b>
<b>Program perencanaan lingkungan hidup</b>	Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)	<b>Kegiatan</b>	<b>15</b>	<b>29.198.700</b>
<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh) kabupaten/kota</b>	Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>29.090.900</b>
<b>Pengendalian pelaksanaan rpplh kabupaten/kota</b>	Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)	<b>Kegiatan</b>	<b>15</b>	<b>29.090.900</b>
<b>Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis klhs kabupaten/kota</b>	Dokumen klhs	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>107.800</b>
<b>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</b>	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>9.200</b>

<b>Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup</b>	Penyelenggaraan klhs utk Krp yang berpotensi Menimbulkan dampak/resiko Lingkungan hidup	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>98.600</b>
<b>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	Terpantaunya kualitas Lingkungan hidup kota Tebing tinggi	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>468.190.420</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Dokumen laporan pengujian Kualitas air limbah, air Sungai, udara, dan Inventarisasi gas rumah Kaca serta proklam	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>468.190.420</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah pengambilan contoh Uji, pengujian parameter Kualitas lingkungan dan Dokumen mutu yang dilaksanakan	Dokumen	8	298.468.900
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terkendalinya dampak Perubahan iklim	Dokumen	2	69.273.300
Pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Dokumen pengujian dan Pemeriksaan air limbah, air Sungai, udara emisi bergerak Dan tidak bergerak	Dokumen	5	100.448.220
<b>Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)</b>	<b>Terlaksananya ruang terbuka hijau (rth)</b>	<b>Hektare</b>	<b>192,9</b>	<b>3.127.636.652</b>
<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>	<b>Luas rth yang dikelola</b>	<b>Hektare</b>	<b>192,9</b>	<b>3.127.636.652</b>
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Hektare	192,9	3.127.636.652
<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah B3</b>	Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (b3)	<b>Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>10</b>	<b>24.989.400</b>
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pengumpulan limbah b3 Dalam satu (satu) daerah kabupaten/kota	<b>Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan</b>	<b>10</b>	<b>24.989.400</b>
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan/atau Penimbunan</b>	Koordinasi dan sinkornisasi Pengelolaan limbah b3 Dengan pemerintah provinsi Dalam rangka Pengangkutan, peman faatan, Pengelolaan	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>24.989.400</b>

	dan/atau penimbunan			
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)</b>	Perusahaan Yang Taat Dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>165.201.404</b>
<b>Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/AtauKegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Udara Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Pplh Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>165.201.404</b>
<b>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Pplh</b>	Dokumen Yang Taat /Dokumen Izin Yang Dikeluarkan	<b>Angka</b>	<b>3</b>	<b>34.993.600</b>
<b>Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan Terhadap pelaku usaha Terkait kepatuhan terhadap lingkungan hidup	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>130.207.804</b>
<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkunga Hidup Untuk Masyarakat</b>	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>53.277.000</b>
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>53.277.000</b>
<b>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</b>	Tercapainya Penghargaan Bagi Kota Tebing Tinggi, Penghargaan Stand Pameran Terbaik Pada Tingkat Provinsi Dan Terlaksananya Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>53.277.000</b>
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>100.718.400</b>
<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pemnberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>100.718.400</b>

	Masyarakat			
<b>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba Ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Terselenggaranya Penilaian Sekolah Adiwiyata Dan Lomba Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Tebing Tinggi	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>100.718.400</b>
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah di Kota Tebing Tinggi	<b>Persen</b>	<b>Pengurangan 28 % dan Penanganan 71 %</b>	<b>11.791.792.955</b>
<b>Pengelolaan Sampah</b>	Berkurangnya Volume Timbulan Sampah	<b>Persen</b>	<b>Pengurangan 28 % dan Penanganan 71 %</b>	<b>11.791.792.955</b>
<b>Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tpst/Spa Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, PendaauranUlang, dan Pemanfaatan Kembali	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>11.791.792.955</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup kota Tebing Tinggi dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi 2023-2026. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dengan penilaian sebagai berikut:

Nilai Angka	Kategori
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

##### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sesuai dengan **Surat Dirjen PPKL Kemen LHK Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, sejak tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup harus menggunakan metode perhitungan baru dan telah ditetapkan target IKLH Kota Tebing Tinggi tahun 2024 sebesar 57,49. Maka jika dibandingkan dengan capaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar 60,25 sesuai dengan

kategori penilaian yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai LKjIP Dinas Lingkungan Hidup terhadap indikator capaian masuk kategori sangat tinggi.

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,49	60,25	104,8	Sangat baik	Dinas Lingkungan Hidup

Dimana sumber data pencapaian nilai IKLH diperoleh dari perhitungan IKLH sesuai dengan rumus yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

**a. IKA Kota Tebing Tinggi 2024**

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang Memenuhi Mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	0	0 %	70	0
Ringan	20	100 %	50	50
Sedang	0	0 %	30	0
Berat	0	0 %	10	0
<b>Nilai IKA Kota Tebing Tinggi</b>				<b>50</b>

**b. IKU Kota Tebing Tinggi**

**a. Indeks NO<sub>2</sub>**

Rata-rata NO<sub>2</sub> untuk Transportasi (dalam satuan µg/m<sup>3</sup>)

$$= \frac{21.00 + 18.26 + 7.97 + 13.00 + 3.69 + 11.60}{6}$$

$$= 12.5867 \text{ µg/m}^3$$

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata NO}_2 \text{ untuk Industri (dalam satuan } \mu\text{g/m}^3\text{)} \\ &= \frac{17.90 + 12.48 + 5.22 + 10.26 + 4.26 + 8.55}{6} \\ &= \mathbf{9.7783} \mu\text{g/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata NO}_2 \text{ untuk Pemukiman (dalam satuan } \mu\text{g/m}^3\text{)} \\ &= \frac{5.00 + 4.57 + 2.83 + 3.33 + 1.44 + 4.69}{6} \\ &= \mathbf{3.6433} \mu\text{g/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata NO}_2 \text{ untuk Komersil/Perkantoran (dalam satuan } \mu\text{g/m}^3\text{)} \\ &= \frac{7.08 + 7.47 + 3.49 + 7.82 + 4.32 + 12.52}{6} \\ &= \mathbf{7.1167} \mu\text{g/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata NO}_2 \text{ Kota (dalam satuan } \mu\text{g/m}^3\text{)} \\ &= \frac{12.5867 + 9.7783 + 3.6433 + 7.1167}{4} \\ &= \mathbf{8.2813} \mu\text{g/m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks NO}_2 \text{ Kota} &= \frac{\text{Rata-rata NO}_2 \text{ Kota}}{\text{Baku Mutu Eu}} \\ &= \frac{8.28125 \mu\text{g/m}^3}{40 \mu\text{g/m}^3} \\ &= \mathbf{0.2070} \end{aligned}$$

#### b. Indeks SO<sub>2</sub>

$$\begin{aligned} &\text{Rata-rata SO}_2 \text{ untuk Transportasi (dalam satuan } \mu\text{g/m}^3\text{)} \\ &= \frac{17.90 + 15.93 + 2.57 + 5.81 + 7.94 + 8.54}{6} \\ &= \mathbf{9.7817} \mu\text{g/m}^3 \end{aligned}$$

Rata-rata SO<sub>2</sub> untuk Industri (dalam satuan µg/m<sup>3</sup>)

$$= \frac{18.60 + 11.27 + 7.52 + 11.87 + 11.37 + 5.77}{6}$$

$$= \mathbf{11.0667 \mu g/m^3}$$

Rata-rata SO<sub>2</sub> untuk Pemukiman (dalam satuan µg/m<sup>3</sup>)

$$= \frac{4.67 + 5.90 + 4.87 + 2.56 + 2.57 + 3.86}{6}$$

$$= \mathbf{4.0717 \mu g/m^3}$$

Rata-rata SO<sub>2</sub> untuk Komersil/Perkantoran (dalam satuan µg/m<sup>3</sup>)

$$= \frac{9.03 + 8.12 + 6.27 + 5.00 + 7.25 + 1.64}{6}$$

$$= \mathbf{6.2183 \mu g/m^3}$$

Rata-rata SO<sub>2</sub> Kota (dalam satuan µg/m<sup>3</sup>)

$$= \frac{9.7817 + 11.0667 + 4.0717 + 6.2183}{4}$$

$$= \mathbf{7.7846 \mu g/m^3}$$

$$\mathbf{Indeks SO_2 Kota} = \frac{\text{Rata-rata } NO_2 \text{ Kota}}{\text{Baku Mutu Eu}}$$

$$= \frac{7.7846 \mu g/m^3}{20 \mu g/m^3}$$

$$= \mathbf{0.3892}$$

**c. IKU Kota**

$$\begin{aligned}
 I_{EU} &= \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2} \\
 &= \frac{0.2070 + 0.3892}{2} \\
 &= 0.2981
 \end{aligned}$$

**Maka dapat dihitung Nilai IKU Kota Tahun 2024**

$$\begin{aligned}
 IKU &= 100 - \left( \frac{50}{0.9} (I_{eu} - 0,1) \right) \\
 &= 100 - \left( \frac{50}{0.9} (0.2981 - 0,1) \right) \\
 &= 100 - \left( \frac{50}{0.9} (0.1981) \right) \\
 &= 100 - (11.0072)
 \end{aligned}$$

$$\mathbf{IKU = 88.9928 \approx 88.99}$$

Maka diperoleh nilai IKU Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah **88.99**

**a. Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

**UNTUK PERHITUNGAN IKL TAHUN 2024**

Luas Wilayah Kota Tebing Tinggi (LW) = 3916,96857111105 ha

Luas RTH (Lrth) = 71,91545299999999 ha

Luas Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya (Lbapl) = 85,83821999999998 ha

Luas RHL = 7,62771206858 ha

**a. Luas Tutupan Lahan (LTL)**

$$\begin{aligned}
 LTL &= Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6) \\
 LTL &= 0 + ((0 + 85,83821999999998 + 71,91545299999999) \times 0,6) \\
 &\quad + (7,62771206858 \times 0,6) \\
 LTL &= 0 + 94,65220379999998 + 4,576627241148 \\
 LTL &= 99,22883104114787 \text{ ha}
 \end{aligned}$$

## b. Tutupan Lahan (TL)

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

$$TL = \frac{99,22883104114787 \text{ ha}}{3916,96857111105 \text{ ha}}$$

$$TL = 0,0253330679681715$$

## c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

$$IKL = 100 - \left( (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left( (84,3 - (0,02533306796817151 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left( (84,3 - (2,533306796817151)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left( (81,76669320318285) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - \left( (81,652) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKL = 100 - 75,29161436757168$$

$$IKL = 24,70838563242832$$

$$IKL = \mathbf{24,71}$$

$$IKLH \text{ Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$= (0,376 \times 50) + (0,405 \times 88,9928) + (0,219 \times 24,70838563242832)$$

$$= 18,8 + 36,042084 + 5,4111364535$$

$$= 60,253220454$$

$$= \mathbf{60,25}$$

## 3.1.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Target IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah ditetapkan diawal tahun 2024 dimana target yang ditetapkan masih menggunakan metode baru sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Dicantumkan Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026. Jika

dibandingkan dengan Target IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, nilai IKLH memang terdapat penurunan yang bisa dilihat dalam table dibawah:

Tabel 9 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,13	60,55	105,99 (Sangat Tinggi)	57,49	60,25	104,88 (sangat tinggi)

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Akhir Tahun Renstra

Sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026, Perbandingan IKLH Tahun 2024 dan target akhir Renstra 2023-2026, dimana targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10 Kemajuan Capaian Sasaran Renja 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Tahun Renstra 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2023-2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	5	6 = $4/5 \times 100$
	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,255	58	96,26

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standard Nasional

Untuk menjawab Misi RPJMN 2020-2024 No.8 yaitu Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Agenda Pembangunan Presiden no. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup melalui **Surat Dirjen PPKL Kemen LHK Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 4**

**Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 dan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, telah menyamakan metode dan menetapkan target tiap kabupaten/kota yang harus dicapai tiap tahunnya, dimana Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan untuk mencapai IKLH sesuai table berikut:

Tabel 11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8 = $\frac{6}{7} \times 100$
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,25	57,49	104,8%

### 3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Adapun yang menjadi faktor Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai Target IKLH ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel 12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,49	60,25	104,8	Sesuai dengan <b>Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b> , capaian IKLH Dinas Lingkungan Hidup sangat baik, hal ini disebabkan Kesadaran masyarakat menjaga lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terus melakukan edukasi mengenai lingkungan hidup dan pengawasan ketat.</li> <li>2. Melakukan Pengujian di Musim Kemarau</li> </ol>

								yang terus meningkat disebabkan pengawasaan serta edukasi lingkungan hidup yang terus dilakukan	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Adapun Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat dalam table berikut:

Mengingat Capaian IKLH Tahun 2023 yakni sebesar 107,32 % dibandingkan dengan Capaian IKLH Tahun 2024 yakni sebesar 104,8 %, terjadi penurunan, hal ini disebabkan terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Jika diperhatikan kembali seluruh data hasil pemantauan kualitas air sungai, maka akan diperoleh data hasil perhitungan yang selalu muncul sebagai Indeks Pencemar maksimum adalah pada parameter Total Fosfat, meskipun parameter BOD dan COD juga hampir seluruhnya melewati baku mutu namun pada perhitungan indeks pencemar tidak ada yang lebih tinggi dari indeks pencemar pada Total Fosfat. Pencemar fosfat ini biasanya dihasilkan dari Perkebunan, pertanian maupun aktivitas rumah tangga. Yang disinyalir berasal dari luar Tebing dan saat pengambilan sample mengalir melalui Sungai Tebing Tinggi. Nilai IKLH juga terbantu akibat sumbangan dari nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), dimana jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan.

Maka Sebaiknya Pengujian di tahun 2024 direncanakan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, direncanakan rentang bulan Februari dan Juni 2024.

### 3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi atas Sasaran Strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan” adalah penjumlahan dari Efisiensi program/kegiatan hasil perkalian alokasi anggaran per program/kegiatan dengan realisasi output per program/kegiatan dikurang realisasi per anggaran program/kegiatan dibagi dengan alokasi anggaran per program/kegiatan. Sesuai Dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PMK.02/2021 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA digambarkan dengan Rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Dimana:

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 13. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			(AARO*CR O)-RARO	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	AARO *CRO		
1	Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	57,49	60,25	104,8	<b>20.779.589.951</b>	<b>19.332.192.790</b>	20.903.985.371	1.325.295.487	<b>6,38</b>

Sasaran Strategis /Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	HASIL PERKALIAN CAPAIAN KINERJA DAN PAGU	HASIL PENGURANGAN DENGAN SERAPAN
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Peerkantoran dengan Baik	12	12	100%	5.018.585.020	4.862.489.748	97%	3,2%	5.018.585.020	156.095.272
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	10	10	100%	91.817.400	78.339.212	85%	17,2%	91.817.400	13.478.188
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	100%	80.299.800	70.450.312	88%	14,0%	80.299.800	9.849.488
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5	5	100%	11.517.600	7.888.900	68%	46,0%	11.517.600	3.628.700
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Laporan pelaksanaan administrasi keuangan	30	30	100%	4.235.128.800	4.131.837.552	98%	2,5%	4.235.128.800	103.291.248
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	60	60	100%	4.166.629.000	4.081.961.302	98%	2,1%	4.166.629.000	84.667.698
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	24	24	100%	13.298.000	13.156.570	99%	1,1%	13.298.000	141.430
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd	4	4	100%	55.201.800	36.719.680	67%	50,3%	55.201.800	18.482.120
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Laporan pelaksanaan barang milik daerah	12	12	100%	27.467.200	26.712.327	97%	2,8%	27.467.200	754.873
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah premi asuransi gedung kantor dan kendaraan dinas	12	12	100%	24.972.200	24.255.327	97%	3,0%	24.972.200	716.873
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan bmd	12	12	100%	2.495.000	2.457.000	98%	1,5%	2.495.000	38.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pelaksanaan administrasi kepegawaian	1	1	100%	15.500.000	0	0%	#DIV/0!	15.500.000	15.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Batik	62	0	0%	15.500.000	0	0%	#DIV/0!	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Laporan pelaksanaan administrasi umum	1	1	100%	266.605.000	259.529.957	97%	2,7%	266.605.000	7.075.043
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	100%	19.993.600	15.778.000	79%	26,7%	19.993.600	4.215.600

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	100%	29.998.900	29.264.700	98%	2,5%	29.998.900	734.200
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	100%	15.000.500	13.067.000	87%	14,8%	15.000.500	1.933.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12	12	100%	201.612.000	201.420.257	100%	0,1%	201.612.000	191.743
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bmd yang diadakan	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>25.512.300</b>	<b>24.830.000</b>	<b>97%</b>	<b>2,7%</b>	<b>25.512.300</b>	<b>682.300</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	2	100%	20.209.900	24.830.000	123%	-18,6%	20.209.900	-4.620.100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2	2	100%	5.302.400	5.290.000	100%	0,2%	5.302.400	12.400
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>243.904.320</b>	<b>230.561.767</b>	<b>95%</b>	<b>5,8%</b>	<b>243.904.320</b>	<b>13.342.553</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	12	100%	3.003.000	3.000.000	100%	0,1%	3.003.000	3.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	100%	11.266.400	105.066.607	933%	-89,3%	11.266.400	-93.800.207
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	12	100%	128.237.320	122.495.160	96%	4,7%	128.237.320	5.742.160
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik DaerahJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>112.650.000</b>	<b>110.678.933</b>	<b>98%</b>	<b>1,8%</b>	<b>112.650.000</b>	<b>1.971.067</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	12	100%	53.200.000	51.480.933	97%	3,3%	53.200.000	1.719.067
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12	12	100%	59.450.000	59.198.000	100%	0,4%	59.450.000	252.000
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>29.198.700</b>	<b>17.145.400</b>	<b>59%</b>	<b>70,3%</b>	<b>29.198.700</b>	<b>12.053.300</b>
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>29.090.900</b>	<b>17.145.400</b>	<b>59%</b>	<b>69,7%</b>	<b>29.090.900</b>	<b>11.945.500</b>
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh)	15	15	100%	29.090.900	17.145.400	59%	69,7%	29.090.900	11.945.500
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1	1	100%	9.200	0	0%	#DIV/0!	9.200	9.200
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	1	1	100%	98.600	0	0%	#DIV/0!	98.600	98.600

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Perusahaan Yang Taat Dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan	2	2	100%	165.201.404	89.523.086	54%	84,5%	165.201.404	75.678.318
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Udara Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerinnth Daerah Kabupaten/Kota	6	6	100%	165.201.404	89.523.086	54%	84,5%	165.201.404	75.678.318
Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang di terbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen Yang Taat /Dokumen Izin Yang Dikeluarkan	3	3	100%	130.207.804	72.920.886	56%	78,6%	130.207.804	57.286.918
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan Terhadap pelaku usaha Terkait kepatuhan terhadap lingkungan hidup	3	3	100%	34.993.600	16.602.200	47%	110,8%	34.993.600	18.391.400
Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat	2	2	100%	53.277.000	40.146.300	75%	32,7%	53.277.000	13.130.700
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat	3	3	100%	53.277.000	40.146.300	75%	32,7%	53.277.000	13.130.700
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penilaian Sekolah Adiwiyata Dan Lomba Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Tebing Tinggi	3	3	100%	53.277.000	40.146.300	75%	32,7%	53.277.000	13.130.700
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tercapainya Penghargaan Bagi Kota Tebing Tinggi, Penghargaan Stand Pameran Terbaik Pada Tingkat Provinsi Dan Terlaksananya Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	3	3	100%	100.718.400	68.787.600	68%	46,4%	100.718.400	31.930.800
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3	3	100%	100.718.400	68.787.600	68%	46,4%	100.718.400	31.930.800
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Pmnberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	3	3	100%	100.718.400	68.787.600	68%	46,4%	100.718.400	31.930.800

<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Terpantaunya kualitas Lingkungan hidup kota Tebing tinggi	8	8	100%	468.190.420	430.627.299	92%	8,7%	468.190.420	37.563.121
<b>PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA</b>	Dokumen laporan pengujian Kualitas air limbah, air Sungai, udara, dan Inventarisasi gas rumah Kaca serta proklam	8	8	100%	468.190.420	430.627.299	92%	8,7%	468.190.420	37.563.121
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Dan Dokumen Mutu Yang Dilaksanakan	1	1	100%	100.448.220	91.724.045	91%	9,5%	100.448.220	8.724.175
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terkendalinya dampak Perubahan iklim	2	2	100%	298.468.900	278.374.554	93%	7,2%	298.468.900	20.094.346
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen pengujian dan Pemeriksaan air limbah, air Sungai, udara emisi bergerak Dan tidak bergerak	5	5	100%	69.273.300	60.528.700	87%	14,4%	69.273.300	8.744.600
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Terlaksananya ruang terbuka hijau (rth)</b>	<b>192,9</b>	<b>192,9</b>	100%	<b>3.127.636.652</b>	<b>2.956.471.291</b>	<b>95%</b>	<b>5,8%</b>	<b>3.127.636.652</b>	<b>171.165.361</b>
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas rth yang dikelola	192,9	192,9	100%	3.127.636.652	2.956.471.291	95%	5,8%	3.127.636.652	171.165.361
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	192,9	192,9	100%	3.127.636.652	2.956.471.291	95%	5,8%	3.127.636.652	171.165.361
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B3</b>	Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (b3)	<b>10</b>	<b>10</b>	100%	<b>24.989.400</b>	<b>20.447.400</b>	<b>82%</b>	<b>22,2%</b>	<b>24.989.400</b>	<b>4.542.000</b>
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pengumpulan limbah b3 Dalam satu (satu) daerah kabupaten/kota	<b>10</b>	<b>10</b>	100%	<b>24.989.400</b>	<b>20.447.400</b>	<b>82%</b>	<b>22,2%</b>	<b>24.989.400</b>	<b>4.542.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan limbah b3 Dengan pemerintah provinsi Dalam rangka Pengangkutan, pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau penimbunan	1	1	100%	24.989.400	20.447.400	82%	22,2%	24.989.400	4.542.000
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Persentase Penanganan Dan Pengurangan Sampah Di Kota Tebing Tinggi	<b>28%</b>	<b>28%</b>	100%	<b>11.791.792.955</b>	<b>10.846.554.666</b>	<b>92%</b>	<b>8,7%</b>	<b>11.791.792.955</b>	<b>945.238.289</b>
<b>Pengelolaan Sampah</b>	Berkurangnya Volume Timbulan Sampah	<b>28%</b>	<b>28%</b>	100%	<b>11.791.792.955</b>	<b>10.846.554.666</b>	<b>92%</b>	<b>8,7%</b>	<b>11.791.792.955</b>	<b>945.238.289</b>

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang, Dan Pemanfaatan Kembali	12	12	100%	11.791.792.955	10.846.554.666	92%	8,7%	11.791.792.955	945.238.289
--	---	----	----	------	----------------	----------------	-----	------	----------------	-------------

### 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Keberhasilan pencapaian nilai IKU Dinas Lingkungan Hidup merupakan sumbangan dari keberhasilan tiap kegiatan yang mendukung/menunjang nilai IKU Dinas Lingkungan Hidup, yang tergambar dalam table dibawah:

Tabel 15. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK
1	2	3	4	5	6	7	8
Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BULAN	12	12	100	Menunjang
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100	Menunjang
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100	Menunjang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	100	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	30	30	100	Menunjang
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Oang	60	60	100	Menunjang
		Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD	Dokumen	24	24	100	Menunjang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	4	100	Menunjang
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	Menunjang

		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1	0	0	Menunjang
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Set	62	0	0	Menunjang
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100	Menunjang
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	100	Menunjang
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	100	Menunjang
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	Menunjang

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	100	Menunjang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan	15	15	100	Menunjang
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen	15	15	100	Menunjang
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kegiatan	15	15	100	Menunjang
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	1	1	100	Menunjang
		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Dokumen	1	1	100	Menunjang
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan	2	2	100	Menunjang

		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	6	6	100	Menunjang
		Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang di terbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan	2	2	100	Menunjang

		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan	3	3	100	Menunjang
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen	8	8	100	Menunjang
		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Dokumen	8	8	100	Menunjang
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	Menunjang

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	2	100	Menunjang
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	5	5	100	Menunjang
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Ha	192,9	192,9	100	Menunjang
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Ha	192,9	192,9	100	Menunjang
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	192,9	192,9	100	Menunjang
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B3</b>	Pelaku Usaha	10	10	100	Menunjang
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	10	10	100	Menunjang

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Dokumen	1	1	100	Menunjang
		Program Pengelolaan Persampahan	Persen	28%	28%	100	Menunjang
		Pengelolaan Sampah	Persen	28%	28%	100	Menunjang
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Laporan	12	12	100	Menunjang

### 3.1.7.2. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan alat dan arah yang sangat besar pengaruhnya untuk mencapai indikator kinerja, adapun capaian anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

TUJUAN	INDIKATOR	BIDANG/SUB UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI KINERJA	TOTAL DANA P.APBD 2024 (Rp)	REALISASI DANA YANG SUDAH DILAKSANAKAN (Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Perilaku Masyarakat Berwawasan Lingkungan/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BULAN	12	12	5.018.585.020	4.862.489.748	96,89
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	91.817.400	78.339.212	85,32
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	80.299.800	70.450.312	87,73
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	11.517.600	7.888.900	68,49
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	30	30	4.235.128.800	4.131.837.552	97,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Oang	60	60	4.166.629.000	4.081.961.302	97,97
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	24	24	13.298.000	13.156.570	98,94
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	4	55.201.800	36.719.680	66,52
		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Bulan	12	12	27.467.200	26.712.327	97,25

		<b>Perangkat Daerah</b>						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	<b>Bulan</b>	12	12	24.972.200	24.255.327	97,13
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	<b>Bulan</b>	12	12	2.495.000	2.457.000	98,48
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1	0	15.500.000	0	0,00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Set	62	0	15.500.000	0	0,00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>266.605.000</b>	<b>259.529.957</b>	<b>97,35</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	19.993.600	15.778.000	78,92
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	29.998.900	29.264.700	97,55
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	15.000.500	13.067.000	87,11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	201.612.000	201.420.257	99,90

		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	<b>Kegi atan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	25.512.300	24.830.000	97,33
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	2	20.209.900	24.830.000	122,86
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	5.302.400	5.290.000	99,77
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	<b>Tahu n</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>243.904.320</b>	<b>230.561.767, 00</b>	<b>94,53</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bula n	12	12	3.003.000	3.000.000	99,90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bula n	12	12	11.266.400	105.066.607	932,57
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bula n	12	12	128.237.320	122.495.160	95,52
		<b>Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	<b>Bula n</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>112.650.000</b>	<b>110.678.933</b>	<b>98,25</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Bula n	12	12	53.200.000	51.480.933	96,77

		Dinas Jabatan						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	59.450.000	59.198.000	99,58
		<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>29.198.700</b>	<b>17.145.400</b>	<b>58,72</b>
		<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>29.090.900</b>	<b>17.145.400</b>	<b>58,94</b>
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kegiatan	15	15	29.090.900	17.145.400	58,94
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	1	1	9.200	9.200	100,00
		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	Dokumen	1	1	98.600	98.600	100,00
		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>165.201.404</b>	<b>89.523.086</b>	<b>54,19</b>

		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>						
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>165.201.404</b>	<b>89.523.086</b>	<b>54,19</b>
		Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang di terbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan	3	3	130.207.804	72.920.886	56,00

		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan	3	3	34.993.600	16.602.200	47,44
		<b>Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>53.277.000</b>	<b>40.146.300</b>	<b>75,35</b>
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	3	3	53.277.000	40.146.300	75,35
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan	3	3	53.277.000	40.146.300	75,35
		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.718.400</b>	<b>68.787.600</b>	<b>68,30</b>
		<b>Pemberian Pengharaagn Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.718.400</b>	<b>68.787.600</b>	<b>68,30</b>

		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan	3	3	100.718.400	68.787.600	68,30
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>468.190.420</b>	<b>430.627.299</b>	<b>91,98</b>
		<b>PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>468.190.420</b>	<b>430.627.299</b>	<b>91,98</b>
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<b>Dokumen</b>	1	1	100.448.220	91.724.045	91,31
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<b>Dokumen</b>	2	2	298.468.900	278.374.554	93,27

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	5	5	69.273.300	60.528.700	87,38
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Ha	192,9	192,9	3.127.636.652	2.956.471.291	94,53
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Ha	192,9	192,9	3.127.636.652	2.956.471.291	94,53
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	192,9	192,9	3.127.636.652	2.956.471.291	94,53
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B3</b>	Pelaku Usaha	10	10	24.989.400	20.447.400	81,82
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaku Usaha	10	10		20.447.400	81,82

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Dokumen	1	1	24.989.400	20.447.400	81,82
		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Perse</b> <b>n</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>11.791.792.955</b>	<b>10.846.554.666</b>	<b>91,98</b>
		<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Perse</b> <b>n</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>11.791.792.955</b>	<b>10.846.554.666</b>	<b>91,98</b>
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Laporan	12	12	11.791.792.955	10.846.554.666	91,98

## BAB IV

### PENUTUP

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan LKjIP merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis, maupun langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menunjukkan sinkronisasi antara rencana dengan realisasi serta pencapaian hasil kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan serta menjamin adanya kesinambungan program kerja di tahun mendatang guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup dari tahun ke tahun. Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja atas indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun awal pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Mengawali awal tahun perencanaan lima tahunan dengan kinerja yang baik dan berhasil, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi akan senantiasa melakukan perbaikan dan pembenahan dari tahun ke tahun agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan terkait urusan Lingkungan Hidup dapat direalisasikan dan mampu mengakomodasi seluruh permasalahan mengenai Lingkungan Hidup yang ada di Kota Tebing Tinggi demi terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang bersih, sehat, dan bebas pencemaran.